

ANALISIS EKONOMI DAMPAK KEBERADAAN PPP MORODEMAK, KABUPATEN DEMAK, JAWA TENGAH

Analysis Economic of the impact of the Existence of the Morodemak Beach Fishing Port, Demak Regency, Central Java.

Rema Monita^{*)}, Imam Triarso, Faik Kurohman

Departemen Perikanan Tangkap, Jurusan Perikanan,

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah – 50275, Telp/Fax. +6224 7474698

(email: remamonita@gmail.com)

ABSTRAK

Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak merupakan pelabuhan perikanan yang termasuk ke dalam klasifikasi pelabuhan tipe C menurut PER/MEN/KP/NO.8/2012. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang pelabuhan perikanan berdasarkan PER/MEN/KP/NO.8/2012 dan menganalisis dampak ekonomi dari pembangunan dan pengembangan PPP Morodemak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 82 responden yang berasal dari kegiatan ekonomi yang terkait secara langsung dari kegiatan operasional pelabuhan maupun yang terkait tidak langsung dengan kegiatan operasional pelabuhan yaitu unit usaha ekonomi yang berada di pelabuhan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis nilai manfaat langsung dari nilai manfaat dan nilai biaya. Hasil penelitian menunjukkan nilai manfaat PPP Morodemak sebesar Rp 83.181.658.170 dan nilai biaya sebesar Rp 79.410.122.677 sehingga didapatkan nilai NPV sebesar Rp 3.771.535.493 dengan nilai *B/C ratio* senilai 1,04. Hal ini menunjukkan PPP Morodemak berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pantai yaitu terjadinya peningkatan usaha dan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar, dimana hal ini berpengaruh pada pendapatan dilihat dari hasil analisis biaya dan manfaat, keberadaan fasilitas PPP Morodemak memberikan manfaat yang besar.

Kata kunci : Pelabuhan Perikanan, Morodemak, Analisis Ekonomi.

ABSTRACT

Morodemak Beach Fishing Port is a fishing port that is included in the classification of type C ports according to PER/MEN/KP/NO.8/2012. Morodemak Beach Fishery Port has strategic role in fisheries and marine development, as center of marine fishery activities. This study aims to analyze the availability of basic, functional, and supporting facilities for fishing ports based on PER/MEN/KP/NO.8/2012 and to analyze the economic impact of the development of Morodemak Beach Fishing Port, Demak Regency, Central Java. The method used in this research is descriptive. The sample used in this study amounted to 82 respondents who came from economic activities that are directly related to port operational activities or those that are indirectly related to port operational activities, economic business units located at the port. This research was conducted from January to February 2020. Analysis method can be used in this research is descriptive and direct benefit value of the benefits and costs. The results showed that value from benefits of Morodemak Beach Fishing Port was Rp83.181.658.170 and the cost value was Rp79.410.122.677 and NPV value was Rp3.771.535.493 with a *B/C ratio* of 1.04. So the Morodemak Beach Fishing Port has a positive impact on level of welfare of coastal community, the increase in business and opening of new jobs for surrounding community, where this affects income seen from the results of analysis costs and benefits, the existence of Morodemak Beach Fishing Port facility provides great benefits.

Keywords : Fishing Port, Morodemak, Analysis Economic.

PENDAHULUAN

Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ekonomi perlu dilakukan karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dengan kinerja suatu pasarmodal. Kebijakan pembangunan perikanan Kabupaten Demak sebagai pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya adalah pengembangan kawasan PPP Morodemak di Kecamatan Morodemak. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Keberadaan pelabuhan perikanan sangat diperlukan sebagai salah satu infrastruktur pembangunan ekonomi. Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Menurut Adisasmita (2005) untuk menciptakan suatu sistem pembangunan ekonomi daerah yang mandiri dalam arti berkecukupan dan

berkelanjutan dilakukan dengan pendekatan kebijakan pembangunan pada kekhasan lokal yang memanfaatkan sumber daya alam lokal, sumber daya institusional lokal dan kelembagaan yang dimiliki.

Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut terutama yang berada di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah. PPP Morodemak selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar PPP Morodemak. PPP Morodemak yang berfungsi dengan baik akan merupakan titik temu (*terminal point*) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat. Sehingga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama adanya lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan taraf kehidupan (perekonomian) masyarakat nelayan dan masyarakat umum lainnya dari nilai manfaat langsung lapangan kerja yang terkait dengan operasional PPP Morodemak baik secara langsung meliputi kegiatan penangkapan ikan di laut, proses pengolahan, dan pemasaran ikan maka memerlukan fasilitas fungsional yaitu TPI, namun dalam penelitian ini TPI Morodemak merupakan unit sarana yang langsung dikelola oleh DKP Kabupaten Demak sehingga dalam penelitian ini tidak disertakan. Sedangkan nilai manfaat langsung lapangan kerja yang terkait dengan operasional PPP Morodemak secara tidak langsung meliputi unit usaha sewa blong/basket, usaha penyimpanan jaring, usaha penyalur BBM/solar, usaha air bersih, dll.

Analisis ekonomi tentang keberadaan pelabuhan dapat dijadikan dasar perlunya mengetahui dampak keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak terhadap lingkungan sekitarnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis nilai ekonomi dari suatu pelabuhan perikanan, yang meliputi biaya total, biaya variabel, pendapatan, *net present value*, hingga nilai *Net B/C Ratio* yang didapat dari nilai manfaat langsung lapangan kerja yang terkait dengan operasional PPP Morodemak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apakah adanya pelabuhan tersebut berpengaruh atau tidak terhadap perekonomian masyarakat setempat dengan adanya lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar pelabuhan setelah adanya peningkatan status pelabuhan menjadi pelabuhan perikanan pantai. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penelitian mengenai analisis ekonomi dampak keberadaan PPP Morodemak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang ada di PPP Morodemak tersebut, maka perlu dilakukan penelitian ini.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis nilai ekonomi. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif. Setelah data sudah di kumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk analisis nilai ekonomi berupa perhitungan data kuantitatif dari setiap pendapatan yang didapat dari kegiatan operasional yang terkait secara langsung berdasarkan pendapatan pelabuhan namun tidak termasuk dalam TPI Morodemak maupun secara tidak langsung meliputi unit usaha ekonomi yang terkait dengan pelabuhan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seorang responden dari pihak pelabuhan yaitu pimpinan PPP Morodemak dan beberapa responden dari sejumlah populasi usaha ekonomi yang berjalan di PPP Morodemak. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1} \dots\dots\dots 1$$

keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = derajat bebas/tingkat kepercayaan atau keteepatan yang diinginkan.

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut:

Nilai d = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar (>100)

Nilai d = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil (<100)

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Slovin adalah antara 10-20 % dari populasi penelitian (Sugiyono, 2011).

Pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, dengan cara: (1) observasi yaitu pengamatan keadaan eksiting fasilitas pokok pelabuhan, fasilitas penunjang pelabuhan, dan fasilitas fungsional pelabuhan, (2) wawancara dilakukan dengan percakapan dua arah antara peneliti dan responden yaitu Kepala Pelabuhan dan 82 responden yang berasal dari pengelola unit usaha ekonomi di PPP Morodemak. Aspek yang ingin diketahui dari kegiatan wawancara yaitu aspek fasilitas pelabuhan dan aspek finansial usaha ekonomi yang meliputi: biaya investasi, biaya perawatan, biaya administrasi, biaya operasional, dan pendapatan setiap usaha yang berjalan di PPP Morodemak, (3) Dokumentasi dilakukan pada fasilitas pelabuhan yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang, usaha-usaha ekonomi yang ada di PPP Morodemak, (4) Studi pustaka

berasal dari literatur yang digunakan berupa buku, jurnal, dan skripsi suatu penelitian yang berkaitan dengan fasilitas pelabuhan, kegiatan usaha ekonomi, dan valuasi ekonomi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Deskriptif Fasilitas Pelabuhan

Data yang mencakup aspek fasilitas pelabuhan dianalisa secara deskriptif, yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Ketersediaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang ada di PPP Morodemak disesuaikan dengan kriteria Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan ketersediaan fasilitas pokok, fasilitas fungsional maupun fasilitas penunjang yang ada di PPP Morodemak dengan kriteria fasilitas pelabuhan perikanan pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012.

2. Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi yang terkandung dalam dampak keberadaan PPP Morodemak menggunakan nilai manfaat langsung (*direct use value*). Hal ini dikarenakan nilai manfaat langsung (*direct use value*) merupakan output (barang dan jasa) yang terkandung di dalam suatu instansi/perusahaan yang secara langsung dapat dimanfaatkan. Nilai ini didapatkan dengan melakukan survei langsung ke lapangan dan dianalisis dengan menggunakan metode nilai pasar (*market value*).

Bishop (1999), harga/nilai pasar dapat digunakan untuk menggambarkan perhitungan finansial, untuk membandingkan antara manfaat dan biaya dari berbagai alternatif pilihan penggunaan suatu lahan. Nilai pasar dari tiap nilai manfaat langsung merupakan nilai bersih. Nilai manfaat langsung (*direct use value*) dalam penelitian ini diperoleh dengan menghitung pendapatan dari setiap unit usaha yang terkait secara tidak langsung di PPP Morodemak dengan menggunakan analisis manfaat dan biaya untuk mengetahui dampak ekonomi keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.

Analisis nilai manfaat langsung dilakukan dari lapangan kerja yang terkait dengan operasional PPP Morodemak yaitu pendapatan pelabuhan dari DU (daftar ulang) SIPI, tambat labuh, sewa lahan & kios, pas masuk, dan kebersihan tiap tahuntidak termasuk dalam kegiatan yang terdapat pada TPI Morodemak karena pendapatan keseluruhan termasuk retribusi, produksi dan lelang ikan dikelola langsung oleh DKP Kabupaten Demak tidak oleh pihak pelabuhan yang nantinya diserahkan pada DKP Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dari lapangan kerja yang tidak langsung terkait dengan operasional PPP Morodemak yaitu kegiatan yg ditinjau dari unit usaha yg ikut menyediakan kebutuhan nelayan di PPP Morodemak. Perhitungan secara finansial ini menggunakan komponen biaya dan manfaat untuk memudahkan pengelompokan kedua bagian tersebut.

Analisis nilai manfaat dan biaya dapat dilakukan melalui beberapa tahapan perhitungan, yaitu:

1. Perhitungan analisa manfaat dan biaya dalam manfaat sekarang netto/*Net Present Value* (NPV).

$$NPV = A - B$$

Keterangan:

A = Jumlah manfaat sekarang netto

B = Jumlah biaya sekarang netto

Apabila $NPV > 0$ berarti proyek tersebut menguntungkan. Sebaliknya jika $NPV < 0$ berarti proyek tersebut tidak layak diusahakan.

2. Perhitungan analisa manfaat dan biaya dalam manfaat dalam B/C ratio.

$$B/C = \frac{A}{B}$$

Keterangan:

A = Jumlah manfaat sekarang netto

B = Jumlah biaya sekarang netto

Suatu investasi dinyatakan layak apabila memiliki nilai: (i) NPV lebih dari nol, atau (iii) B/C Ratio lebih dari satu (Suherman dan Adhyaksa, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis kabupaten Demak terletak pada koordinat $6^{\circ} 43' 26'' - 7^{\circ} 9' 43''$ lintang selatan dan $110^{\circ} 27' 58'' - 110^{\circ} 48' 47''$ bujur timur. Jarak terjauh dari barat ke timur 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km, dengan luas wilayah 89.743 Ha. Utara kota Demak berbatasan dengan kabupaten Jepara dan laut jawa, bagian timur berbatasan dengan kabupaten Kudus dan Grobogan, bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Semarang dan Grobogan, serta bagian barat berbatasan dengan kotamadya Semarang.

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak

Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak merupakan salah satu dari sembilan Pelabuhan Perikanan Pantai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. PPP Morodemak terletak pada $110^{\circ} 32' 40''$ BT dan $6^{\circ} 49' 30''$ LS, di Dukuh Kongsi, Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Perairan Morodemak berlokasi di muara Sungai Tuntang Lama dimana tambat labuhnya menempati daerah aliran sungai Tuntang Lama.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 38 tahun 2008 dan Perjanjian kerjasama antara Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak No. 36/2010, dan No. 523/045 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengolahan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak. Perjanjian Kerjasama antara DKP Provinsi Jawa Tengah dan DKP Kabupaten Demak No. 523/1956/2010 dan No. 523/882 tanggal 15 Desember 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak. Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, berada di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan luas 3,9 Ha dengan sarana dan prasarana yang tersedia guna melayani dan memberikan fasilitas usaha bidang kelautan dan perikanan Fungsi.

PPP Morodemak menjalin kerjasama dengan instansi lain sebagai narasumber antara lain : Polair Morodemak, Pos PSDKP Morodemak, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Undip Semarang, Bank Jateng, Syabandar Perikanan, BMKG Maritim Semarang, BBPI Semarang, Pos TNI AL Morodemak, BPBD Kabupaten Demak, KSOP Tanjung Mas Semarang, BRI Kanwil Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, Camat Bonang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Demak, Dinsos P2PA Demak, KUB Puspita Bahari, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Demak, BRI Demak, BPOM Semarang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Demak, dan Puskesmas Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak merupakan Pelabuhan yang didirikan oleh DKP Provinsi Jawa Tengah dan dikelola oleh suatu kepala di pelabuhan di PPP tersebut. PPP Morodemak memiliki beberapa sarana dan prasarana yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perikanan di wilayah tersebut seperti halnya kegiatan bongkar muat ikan hasil tangkapan yang terjadi di TPI di PPP Morodemak. TPI Morodemak terletak di Desa Purworejo, Bonang, Demak, Jawa Tengah ini merupakan tempat pendaratan ikan bagi nelayan yang mayoritas tinggal di Desa Morodemak dan Desa Purworejo. TPI Morodemak dikelola langsung oleh DKP Kabupaten Demak namun TPI Morodemak masih termasuk dalam lingkungan PPP Morodemak sebagai fasilitas fungsional pelabuhan. Ikan-ikan yang didaratkan di TPI ini terdiri dari berbagai macam jenis tergantung pada alat tangkap yang digunakan pada kapal nelayan tersebut.

Pelabuhan Perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Demak termasuk dalam klasifikasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal khususnya kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya ikan serta mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan di bidang usaha perikanan (Mahottama *et al.*, 2017). Sehingga PPP Morodemak juga ditunjang dengan sarana dan prasana yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional PPP Morodemak.

a). Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok PPP Morodemak menurut PER.08/MEN/2012 tersaji pada Tabel 1:
Tabel 1. Fasilitas Pokok PPP Morodemak Menurut PER.08/MEN/2012.

Fasilitas Pokok Pelabuhan Menurut PER.08/MEN/2012	Ketersediaan Fasilitas Pokok di PPP Morodemak	Keterangan
Dermaga	Ada	P = 400 m, L = 6 m
Breakwater	Ada	P1 = 139 m P2= 200 m
Turap (Revetment)	Tidak	
Groin	Tidak	
Jalan Kompleks	Ada	40 m
Lahan	Ada	14 Ha
Kolam pelabuhan	Ada	40.000 m ² Kedalaman 2 m
Alur Pelayaran	Ada	397 m
Drainase	Ada	1391,75 m
Jetty	Tidak	

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Sesuai dengan kriteria fasilitas pokok Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012, diketahui bahwa fasilitas pokok yang tersedia di PPP Morodemak tahun 2019 antara lain dermaga dengan panjang 400 m dan lebar 6 m dalam dapat menampung kapal 20 kapal ukuran >30 GT, dua sisi breakwater dengan panjang 139 m dan 200 m, jalan kompleks sepanjang 400 m namun terdapat lahan industri yang belum memiliki akses jalan, memiliki lahan sebesar 14 ha yang dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan perikanan, dan kolam pelabuhan sedalam 2 m, alur pelayaran 397 m dan drainase sepanjang 1391,75 m.

Jadi ketersediaan fasilitas pokok di PPP Morodemak tahun 2019 sesuai dengan kriteria fasilitas pokok yang harus ada di pelabuhan perikanan pantai menurut PER.08/MEN/2012 cukup memadai sehingga dapat menunjang kegiatan operasional perikanan di PPP Morodemak. Meskipun beberapa fasilitas pokok yang terdapat

di PPP Morodemak dalam kondisi kurang baik dan perlu beberapa renovasi. Namun pada PER.08/MEN/2012 juga disebutkan beberapa fasilitas pokok pelabuhan perikanan pantai yang lainnya seperti turap, *groin* dan *jetty*. Hal ini diperkuat oleh Gumilang (2016), bahwa dilihat dari ketersediaan fasilitas ternyata masih terdapat pelabuhan perikanan di Pantura Jawa yang belum terpenuhi, padahal regulasi tentang penetapan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan telah diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 pasal 4. Fasilitas pokok seperti breakwater, turap *groin*, *jetty*, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan drainase masih ada yang belum tersedia di pelabuhan. Umumnya fasilitas pokok yang belum tersedia di pelabuhan adalah penahan sedimen (*groin*).

b). Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional yang terdapat di PPP Morodemak tersaji pada Tabel 2:

Tabel 2. Fasilitas Fungsional PPP Morodemak Menurut PER.08/MEN/2012.

Fasilitas Fungsional Pelabuhan Menurut PER.08/MEN/2012	Ketersediaan Fasilitas Fungsional di PPP Morodemak	Keterangan
Tempat Pemasaran Ikan (TPI)	Ada	656 m ²
Tempat Perbaikan Jaring	Ada	800 m ²
Docking/ Perbaikan Kapal	Tidak	
Bengkel	Tidak	
Penampungan Air bersih	Ada	Kapasitas 2000 m ³
Kantor Administrasi Pelabuhan	Ada	120 m ²
Instalasi Listrik	Ada	12.700 kVA + 2 genset
Telepon	Ada	2 unit
Internet	Ada	2 unit
Radio Komunikasi	Ada	1 unit
Lampu Suar	Ada	2 unit
Menara Pengawas	Ada	1 unit
Rambu-rambu	Tidak	
Instalasi BBM	Ada	2 unit
Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan	Ada	1 unit
Labolatorium Pembinaan Mutu	Tidak	
Transit sheed	Tidak	
Kantor pelayanan terpadu	Ada	1 unit
Perbankan	Tidak	
Transportasi	Ada	7 unit
Tempat pembuangan sementara (TPS)	Ada	1 unit

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Sesuai dengan kriteria fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 bahwa fasilitas fungsional yang tersedia di PPP Morodemak antara lain TPI dengan volume bangunan 656 m², tempat perbaikan jaring dengan volume bangunan 800 m², penampungan air bersih dengan kapasitas 2000 m³, kantor administrasi pelabuhan dengan volume bangunan 120 m³, instalasi listrik dengan daya 12.700 kVA disertai 2 genset, terdapat jaringan internet dan telepon masing-masing dua unit, dan dilengkapi dengan sebuah radio komunikasi, dua lampu suar, tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan satu unit, satu unit kantor pelayan terpadu, dan satu unit tempat pembuangan sementara (TPS). Selain itu pada PPP Morodemak terdapat dua perusahaan penyalur BBM yaitu AKR dan ANWUSA yang didirikan pemerintah untuk menunjang kegiatan perikanan tangkap di PPP Morodemak. Namun salah satu pihak penyalur BBM yaitu AKR sedang tidak beroperasi pada tahun 2019.

Jadi ketersediaan fasilitas fungsional di PPP Morodemak tahun 2019 sesuai dengan kriteria fasilitas fungsional yang harus ada di pelabuhan perikanan pantai menurut PER.08/MEN/2012 sudah memadai meskipun beberapa fasilitas seperti docking kapal, bengkel, rambu-rambu, labolatorium pembinaan mutu, *transit sheed* dan perbankan belum tersedia. Meskipun demikian PPP Morodemak sudah memenuhi syarat fasilitas fungsional yang harus ada di pelabuhan perikanan pantai seperti yang telah di atur dalam PER.08/MEN/2012, namun masih

banyak fasilitas fungsional yang dalam kondisi rusak dan perlu banyak perbaikan dan pemanfaatan yang kurang maksimal. Hal ini diperkuat oleh Gumilang (2016), bahwa ketersediaan fasilitas pelabuhan yang lengkap tentunya berguna untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional pelabuhan perikanan. Pelayanan yang diberikan setiap pelabuhan umumnya berbeda satu dengan yang lain. Pelayanan yang baik salah satunya diindikasikan dengan ketersediaan fasilitas yang ada. Fasilitas pelabuhan perikanan yang lengkap dan berfungsi dengan baik akan memberikan kemudahan bagi pengguna di pelabuhan.

c). Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang yang terdapat di PPP Morodemak tersaji pada Tabel 4:

Tabel 3. Fasilitas Penunjang PPP Morodemak Menurut PER.08/MEN/2012.

Fasilitas Penunjang Pelabuhan Menurut PER.08/MEN/2012	Ketersediaan Fasilitas Penunjang di PPP Morodemak	Keterangan
Pos Jaga	Ada	1 unit
Balai Pertemuan Nelayan	Ada	462 m ²
Pertokoan/Pergudangan	Ada	48 unit
Lahan Jemur Ikan	Ada	72 unit
Pengolah	Ada	9 unit
MCK	Ada	1 unit
Mess Operator		Tidak
Musholla	Ada	204 m ²
Wisma nelayan		Tidak

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Sesuai dengan kriteria fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 bahwa fasilitas penunjang yang tersedia di PPP Morodemak berdasarkan tabe no.4 antara lain pos jaga satu unit, mushola seluas 204 m², dalam kondisi kurang terawat, balai pertemuan nelayan seluas 462 m², pertokoan/ pergudangan sebanyak 48 unit, lahan jemur ikan sebanyak 72 unit, pengolah sebanyak 9 unit, dan satu MCK. Namun di PPP Morodemak tidak terdapat wisma nelayan dan mess operator.

Jadi ketersediaan fasilitas penunjang di PPP Morodemak tahun 2019 sesuai dengan kriteria fasilitas penunjang yang harus ada di pelabuhan perikanan pantai menurut PER.08/MEN/2012 sudah memadai meskipun tidak ada fasilitas seperti mess operator dan wisma nelayan belum tersedia. Pada PER.08/MEN/2012 dikatakan bahwa fasilitas penunjang yang harus ada di PPP antara lain pos jaga dan MCK. Selain itu fasilitas balai pertemuan, mess operator, wisma nelayan, dan pertokoan merupakan fasilitas yang tidak wajib ada di pelabuhan perikanan pantai. Jadi fasilitas pokok, penunjang, dan fungsional di PPP Morodemak sudah termasuk lengkap untuk dikatakan Pelabuhan Perikanan Pantai namun beberapa fasilitas masih perlu perbaikan dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini diperkuat oleh Saputri *et al.* (2017), bahwa Morodemak sudah termasuk cukup lengkap untuk dikatakan Pelabuhan Perikanan Pantai. Fasilitas pokok meliputi dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jalan kompleks, drainase, breakwater, dll. Fasilitas fungsional meliputi TPI, alat komunikasi, instalasi listrik dan air. Sedangkan fasilitas penunjang meliputi balai pertemuan nelayan, mess operator, MCK, pos jaga. Fasilitas-fasilitas tersebut bertujuan untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan nelayan untuk melaut dan juga suatu bentuk pelayanan pihak pelabuhan untuk nelayan.

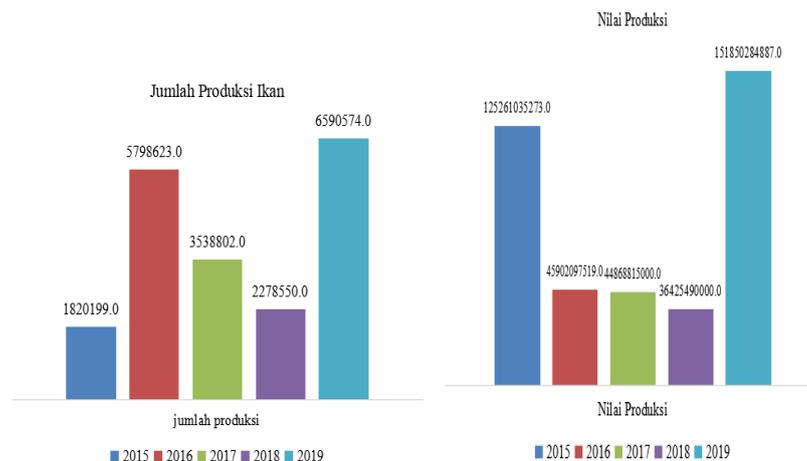
2. Kondisi Peirkanan PPP Morodemak

Jumlah penduduk disekitar PPP Morodemak menurut laporan tahunan PPP Morodemak tahun 2019 yang berkerja sebagai nelayan berjumlah 1.432 orang. Sedangkan yang bekerja sebagai bakul sebanyak 31 orang dan yang bekerja sebagai pengolah sebanyak 56 orang. Namun untuk jumlah bakul dan pengolah belum semuanya tercatat oleh PPP Morodemak karena pada keadaan *exiting* saat ini mayoritas istri nelayan bekerja menjadi bakul baik di TPI maupun langsung kesepakatan melalui nelayan kemudian diolah untuk dijadikan ikan asin dan dijual kembali. Nelayan disekitar PPP Morodemak merupakan nelayan skala kecil atau armada semut yang ditandai dengan ukuran kapal <30 GT serta beroperasi dalam satu hari menangkap (*one day fishing*).

Jenis armada penangkapan yang ada di PPP Morodemak yaitu kapal motor 5-10 GT berjumlah 672 unit sedangkan untuk kapal motor berukuran 10-30 GT berjumlah 677 unit. Jumlah armada penangkapan ikan di PPP Morodemak tersebut berdasarkan alat tangkap yang beroperasi di pelabuhan seperti sodo, bubu, jaring, *purse seine*, arad, *gillnet* dan *trammel net*. Namun pada tahun 2019 pihak pelabuhan hanya mencatat dan memberikan pengarahan kepada nelayan untuk beralih ke alat tangkap *purse seine* baik mini *purse seine* maupun *purse seine* tipe waring. Hal ini diperkuat oleh Saputri *et al* (2013), unit armada penangkapan ikan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak diantaranya adalah kapal mini *purse seine*, *gillnet*, *trammel net*, arad, dan bubu.

Jumlah kunjungan kapal berukuran 10-20 GT di PPP Morodemak tertinggi pada bulan April sebanyak 83 unit kapal. Sedangkan kunjungan kapal berukuran 20-30 GT di PPP Morodemak tertinggi pada bulan Maret dan Oktober sebanyak 6 unit kapal. Namun pada bulan November dan Desember tidak ada aktivitas kunjungan kapal dikarenakan kondisi laut yang tidak stabil, gelombang tinggi dan cuaca buruk sehingga banyak kapal perikanan yang tidak beroperasi dalam penangkapan ikan.

Alat penangkapan ikan yang tercatat di Kecamatan Bonang selama 2019 berjumlah 1807 yang terdiri dari alat tangkap *purse seine* 310 unit yang beberapa diantaranya *purse seine* tipe waring, arad 290 unit, bubu 128 unit, *trammel net* 300 unit, *gillnet* 303 unit, jaring 156 unit, dogol 37 unit, jala 64 unit, longline 8 unit, cotok 2 unit dan bagan 79 unit. Sedangkan alat tangkap yang tercatat di PPP Morodemak hanya 100 terdiri dari 58 unit alat tangkap *purse seine* dan 42 *purse seine* tipe waring. Menurut laporan tahunan PPP Morodemak alat tangkap yang tercatat saat ini yaitu *purse seine* dan *purse seine* tipe waring hal ini dikarenakan alat tangkap lain seperti arad, catrang sudah dilarang penggunaannya oleh hukum sehingga pihak pelabuhan hanya mendata kapal menggunakan alat tangkap *purse seine* tipe waring dan *purse seine*. Pihak PPP Morodemak masih mengajak para nelayan pengguna arad untuk beralih ke alat tangkap *purse seine* tipe waring ini dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di sekitar perairan Jawa sehingga kondisi perairan tetap terjaga.

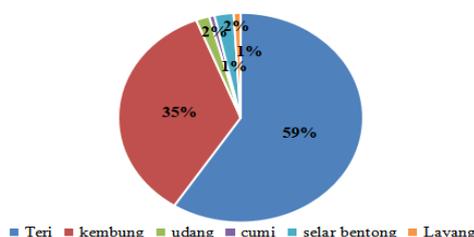


Gambar 1. Grafik Jumlah Produksi dan Nilai Produksi TPI PPP Morodemak Tahun 2015-2019.

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Total jumlah produksi pada tahun 2019 yaitu 6.590.574 kg. Jumlah produksi pada lima tahun terakhir tidak stabil terjadi kenaikan pada tahun 2016 kemudian penurunan dua kali berturut pada tahun 2017 dan 2018. Tinggi rendahnya jumlah produksi ikan di TPI Morodemak dipengaruhi oleh kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Hal ini diketahui bahwa peningkatan jumlah produksi yang signifikan hal ini dikarenakan terjadi angin timur yang artinya musim ini termasuk musim puncak/musim ikan. Sedangkan total nilai produksi pada tahun 2019 yaitu Rp 151.850.284.887, yang merupakan nilai produksi tertinggi pada lima tahun terakhir. Nilai produksi TPI di PPP Morodemak selama lima tahun terakhir tidak stabil. Hal ini dilihat dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti musim penangkapan yang berpengaruh pada jumlah tangkapan nelayan dan jenis ikan yang ditangkap, Restumurti *et al.* (2016) menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut akan mengakibatkan terjadinya fluktuasi setiap tahunnya karena faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Misalnya jika terjadi angin kencang dan gelombang nelayan akan menunggu sampai musim angin dan gelombang tenang sehingga nelayan tidak melaut yang mengakibatkan jumlah produksi menjadi rendah dan nilai produksi perikanan di tahun itu menurun.

Harga ikan rata-rata yang didaratkan di PPP Morodemak untuk alat tangkap *purse seine* tipe waring yaitu Ikan Teri (*Stolephorus sp*) yang harga ikan per kilogram yaitu Rp 11.492. Sedangkan hasil tangkapan ikan untuk alat tangkap *purse seine* yaitu Ikan Kembung (*Rastrelliger*), Ikan Tongkol (*Euthynnus affinis*), Udang (*caridea*), Cumi-cumi (*Loligo sp*), Ikan Selar bentong (*Selar crumenophthalmus*), dan Ikan Layang (*Decapterus*). Masing - masing harga ikan per kilogram yaitu Rp 15.780, Rp 16.384, Rp 81.676, Rp 33.133, Rp 1.950, Rp 3.000. Harga penjualan ikan yang beragam bergantung dari jenis ikan, mutu ikan dan banyaknya ikan yang dilelang.



Gambar 2. Komposisi Ikan yang Tertangkap di PPP Morodemak.

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Komposisi ikan hasil tangkapan terbesar yaitu Ikan Teri (*Stolephorus sp*) yaitu 55% dari alat tangkap *purse seine* tipe waring, selanjutnya pada alat tangkap *purse seine* pada umumnya hasil tangkapan terbesar yaitu Ikan Kembung (*Rastrelliger*) sebesar 35%, selanjutnya yaitu Ikan Tongkol (*Euthynnus affinis*) sebesar 7%, untuk presentasi komposisi Ikan Selar bentong (*Selar crumenophthalmus*) dan udang (*caridea*) sama sebesar 2%, dan untuk Ikan Layang (*Decapterus*) dan cumi-cumi (*Loligo sp*) memiliki komposisi presentase yang sama yaitu 1%. Alat tangkap *purse seine* tipe waring merupakan alat tangkap yang digunakan dengan target tangkapan yaitu Ikan Teri (*Stolephorus sp*) hal ini dikarenakan alat tangkap ini pada bagian kantong dibuat dari jaring dengan mesh size yang lebih kecil (waring) yang bertujuan agar ikan teri nasi dapat tertangkap secara maksimal pada kantong jaring.

3. Nilai Ekonomi

a) . Pendapatan PPP Morodemak

Pendapatan yang diperoleh PPP Morodemak berasal dari Daftar Ulang Surat Ijin Penangkaran Ikan (SIPI) 10–30 GT, Sewa Lahan dan Kios, Tambat Labuh, Pas Masuk Pelabuhan dan Kebersihan. Pendapatan PAD PPP Morodemak setiap bulan pada tahun 2019 tersaji pada tabel 4:

Tabel 4. Pendapatan PAD PPP Morodemak Tahun 2019

Tahun	Daftar Ulang (DU) SIPI	Tambat Labuh	Sewa Lahan dan Kios	Pas masuk	Kebersihan	Jumlah
2015	25.137.300	5.931.720	60.120.000	9.367.800	-	100.556.820
2016	22.287.380	12.794.680	89.400.000	14.280.800	1.234.500	139.997.360
2017	40.997.600	34.854.000	156.131.666	39.448.500	9.096.000	279.527.766
2018	30.952.800	35.849.000	162.718.500	40.936.500	11.052.000	281.508.800
2019	55.577.600	31.798.000	245.040.500	42.167.000	12.922.000	394.520.100

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Menurut laporan tahunan PPP Morodemak tahun 2019, jumlah total pendapatan keseluruhan terbesar diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp 394.520.100, sedangkan pendapatan terkecil terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 100.556.820. Rata-rata pendapatan terbesar diperoleh dari sewa kios/pertokoan. Selain itu pendapatan pelabuhan juga didapatkan dari biaya kebersihan, daftar ulang SIPI, pas masuk dan tambat labuh. Pendapat terkecil yang didapatkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu peningkatan biaya sewa kios/lahan per tahun, banyaknya kapal yang berlabuh dan banyaknya nelayan yang mengurus surat SIPI.

Selain berdasarkan pendapatan dari biaya operasional yang terkait langsung dengan pelabuhan, PPP Morodemak juga mendapat anggaran APBN dan APBD tahun 2019 sebesar Rp. 1.042.500.000,-. Anggaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak Tahun 2019 digunakan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang telah di buat pada tahun sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Rembug Bakul dan Nelayan, Pelaksanaan Teknis Pembinaan Penanganan Ikan diatas Kapal, Bersih Lingkungan, Koordinasi Lintas Sektor, dan Pameran Produk Perikanan. Sedangkan pengeluaran yang dilakukan oleh PPP Morodemak digunakan untuk Swakelola Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak sebesar Rp 2.498.000 dan Swakelola Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak sebesar Rp 38.527.035. Sehingga dapat diketahui keuntungan yang diperoleh pelabuhan yaitu sebesar Rp 353.495.065. Keuntungan tersebut didapatkan dari selisih pendapatan pelabuhan pada tahun 2019 sebesar Rp 394.520.100 dengan biaya pengeluaran PPP Morodemak selama setahun pada tahun 2019 sebesar Rp 41.025.035.

b) . Analisis Kelayakan Usaha Ekonomi di PPP Morodemak

Terdapat beberapa usaha ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat disekitar PPP Morodemak seperti usaha jual pakaian, usaha warung sembako, usaha warung kelontong, usaha penyalur air bersin (isi ulang galon), usaha penyedia es batu, usaha jasa sewa MCK dan usaha yang menjadi komoditas utama penghasil ikan asin yaitu usaha pengolah ikan/jemur ikan.

1. Pengelola usaha jemur ikan

Pengelola usaha jemur ikan ini ada 16 orang diantaranya yaitu Bu muamalah, Bu Siti Aliyah, Bu Tuminah, Bu Zumrotun, Bu Aliyah, Bu Sugeng, Bu Siti Rosadah, Bu Jubaidah, Pak H. Zabidi, Bu Sutriah, Pak Mahfudz, Bu Muakadah, Bu Sholekah, Bu Rukisah, Bu Munadiroh, Bu Yayuk M. dan Bu Maksodah. Rata-rata biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 38.206.042 yang didapatkan dari hasil penjumlahan rata-rata biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan investasi sebesar Rp 9.705.064, biaya penyusutan perawatan gadhang dan waring sebesar Rp 440.000 dan biaya administrasi sewa gedung per tahun sebesar Rp 1.276.471 dengan rata-rata biaya variabel (operasional) per tahun sebesar Rp 6.376.875. Sedangkan rata-rata pendapatan Rp 38.206.042 per tahun. Sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp 19.222.500 pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dibangun PPP Morodemak ini memberikan dampak baik bagi pengelola usaha pengolah ikan. Pengolah ikan di PPP Morodemak mayoritas adalah ibu rumah tangga yang berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah tangga.

2. Pengelola usaha penyalur air bersih

Pengelola usaha penyalur air bersih berupa isi ulang galon ada dua orang yaitu Pak Khalel dan Pak Nurrudin. Rata-rata biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 18.430.000 yang didapatkan dari hasil

penjumlahan biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan investasi sebesar Rp 7.800.000, biaya administrasi sewa gedung sebesar Rp 1.000.000 dan penyusutan perawatan mesin tangki isi galon selama 12x per tahun sebesar Rp 1.200.000 dengan biaya variabel (operasional) per tahun sebesar Rp 8.430.000. Sedangkan rata-rata pendapatan Rp 42.275.000 per tahun. Sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp 23.845.000 pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dibangunnya PPP Morodemak ini memberikan dampak yang baik bagi pengelola usaha penyalur air bersih (isi ulang galon). Air bersih merupakan salah satu kebutuhan perbekalan yang diperlukan oleh nelayan. Air bersih ini digunakan nelayan maupun penduduk sekitar untuk minum dan memasak.

3. Pengelola usaha sewa blong/basket

Pengelola usaha sewa blong/basket ini ada tujuh orang diantaranya yaitu Bu munasaroh, Pak Rastamaji, Bu Sri Wahyuni, Bu Jumrotun, Pak Ahmad Jamal, Pak Wahyudi dan Pak Rokib. Rata-rata biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 10.650.000 yang didapatkan dari hasil penjumlahan biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan investasi sebesar Rp 5.714.286 dan biaya administrasi sewa gedung per tahun sebesar Rp 1.650.000 dengan biaya variabel (operasional) per tahun sebesar Rp 1.350.000. Sedangkan rata-rata pendapatan Rp 15.557.143 per tahun. Sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp 4.826.190 pertahun. Jadi usaha ini merupakan usaha kecil yang cukup menguntungkan namun menguntungkan hanya untuk dijadikan usaha sampingan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dibangunnya PPP Morodemak memberikan dampak baik bagi pengelola usaha sewa blong/basket ini.

4. Pengelola usaha jasa penyewaan MCK

Pengelola usaha jasa penyewaan MCK di PPP Morodemak hanya satu orang yaitu Pak Rum Mauludi. Rata-rata biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 4.640.000 yang didapatkan dari hasil penjumlahan biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan investasi sebesar Rp 80.000 dan biaya administrasi sewa bangunan per tahun sebesar Rp 3.000.000 dengan biaya variabel (operasional) per tahun sebesar Rp 1.560.000. Sedangkan rata-rata pendapatan Rp 9.800.000 tahun. Sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp 5.160.000 pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa dibangunnya PPP Morodemak ini memberikan dampak baik bagi pengelola usaha penyedia jasa MCK. MCK atau kamar mandi merupakan salah satu fasilitas penunjang PPP Morodemak yang dikelola secara pribadi.

5. Pengelola usaha es batu

Pengelola usaha es batu ini hanya satu pihak yaitu dari Pak Paryadi. Rata-rata biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 144.300.000 yang didapatkan dari hasil penjumlahan biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan investasi sebesar Rp 2.000.000/tahun dan biaya administrasi sewa *coolstorage* sebesar Rp 2.000.000/tahun dengan biaya variabel (operasional) sebesar Rp 141.500.000. Sedangkan rata-rata pendapatan Rp 320.000.000 tahun. Sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp 175.700.000 pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa dibangunnya PPP Morodemak ini memberikan dampak baik bagi pengelola usaha es batu. Es batu merupakan salah satu kebutuhan operasional yang diperlukan nelayan saat melakukan trip penangkapan.

6. Pengelola usaha jual pakaian

Pengelola usaha jual pakaian yaitu empat orang diantaranya Ibu Munfaati, Ibu Rodiah, Ibu Siti, dan Ibu Maftukan. Rata-rata biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 17.965.000 yang didapatkan dari hasil penjumlahan biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan investasi, biaya administrasi dan penyusutan perawatan per tahun dengan biaya variabel per tahun. Sedangkan rata-rata pendapatan Rp 39.750.000 tahun. Sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp 13476.667 pertahun. Jadi usaha jual pakaian ini tergolong menguntungkan, namun pekerjaan ini tidak selalu mendapat keuntungan setiap saat. Ada kalanya usaha ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dalam sebulan, hal ini dikarenakan kebanyakan pembeli dari toko ini adalah mayoritas istri nelayan atau nelayan itu sendiri sehingga mengikuti arus perekonomian mereka.

7. Pengelola usaha warung makan/kelontong

Pengelola usaha warung makan/kelontong yaitu sembilan orang diantaranya Ibu Safaaton, Pak Muamilin, Pak Chabib, Ibu Munfaati, Ibu Sofiatun, Pak Komari, Ibu Nawawi, Ibu Maryatun dan Ibu Swi Widayati. Rata-rata biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 18.883.333 yang didapatkan dari hasil penjumlahan biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan investasi, biaya administrasi dan penyusutan perawatan per tahun dengan biaya variabel per tahun. Sedangkan rata-rata pendapatan Rp 11.777.778 tahun. Sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp 1.861.852 pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dibangunnya PPP Morodemak memberikan dampak baik bagi pengelola usaha warung makan/kelontong. Usaha warung makan/kelontong merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk sekitar PPP Morodemak yang bukan merupakan nelayan dan beberapa diantaranya merupakan usaha sampingan para wanita yang berperan sebagai istri nelayan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

8. Pengelola usaha jual sembako

Pengelola usaha jual sembako ada tujuh orang yaitu Ibu Misroaton, Ibu Musmaiyah, Ibu Salminah, Pak Abdul Rozaq, Ibu Dewi Mulyani, Ibu In Safitri dan Bapak Subkhi. Rata-rata biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 20.228.571 yang didapatkan dari hasil penjumlahan biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan investasi per tahun sebesar Rp 9.533.278, biaya administrasi sewa bangunan per tahun sebesar Rp 2.057.143 dan biaya variabel (operasional) per tahun sebesar 8.450.000. Sedangkan rata-rata pendapatan Rp 26.785.714/tahun. Sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp 10.435.667/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dibangunnya PPP Morodemak ini memberikan dampak baik bagi pengelola usaha warung sembako.

9. Pengelola usaha penyalur BBM/Solar yaitu ANWUSA

Pengelola usaha penyalur BBM/Solar yaitu ANWUSA rata-rata biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 19.517.989.448 dalam setahun didapatkan dari hasil penjumlahan biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan investasi, biaya administrasi dan biaya variabel per tahun. Sedangkan rata-rata pendapatan Rp 26.016.991.450/tahun. Sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp 6.500.555.627/tahun. Jadi usaha penyalur BBM/Solar pada PT. Aneka Wira Usaha yaitu Anwusa ini tergolong menguntungkan, sehingga layak untuk diteruskan pada tahun-tahun kedepannya. Hal ini menunjukkan bahwa dibangunnya PPP Morodemak ini memberikan dampak baik bagi pengelola usaha penyalur BBM/Solar.

10. Pengelola usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *purse seine*

Pengelola usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *purse seine* di PPP Morodemak berjumlah 58 orang yang diambil sampel responden sebanyak 17 orang didapatkan hasil pendapatan rata-rata sebesar Rp 1.683.676.471/tahun dengan keuntungan penerimaan sebesar Rp 1.295.601.471. Biaya total rata-rata yang dikeluarkan sebesar Rp 388.075.000. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dibangunnya PPP Morodemak dapat memberikan dampak positif bagi pengelola usaha penangkapan ikan *purse seine* ini karena dapat meningkatkan memberikan keuntungan yang cukup besar dalam satu tahun.

11. Pengelola usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *purse seine*

Pengelola usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *purse seine* tipe waring di PPP Morodemak berjumlah 46 orang yang diambil sampel responden sebanyak 16 orang didapatkan hasil pendapatan rata-rata sebesar Rp 203.218.750/tahun dengan keuntungan penerimaan sebesar Rp 203.218.750/tahun. Biaya total rata-rata yang dikeluarkan sebesar Rp 154.676.494. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dibangunnya PPP Morodemak sebagai tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan dapat memberikan dampak positif bagi pengelola usaha penangkapan ikan *purse seine* tipe waring ini karena dapat meningkatkan memberikan keuntungan yang cukup besar dalam satu tahun. Penggunaan alat tangkap *purse seine* tipe waring sudah dilakukan sejak tahun 2019 hal ini dikarenakan pihak pelabuhan sedang menertibkan nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dengan hasil tangkapan yang menguntungkan salah satunya ikan teri yang merupakan komoditas utama di PPP Morodemak.

c) . Analisis Nilai Ekonomi Dampak Keberadaan PPP Morodemak

1. Nilai Manfaat

Total keuntungan dapat dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5. Total Keuntungan Kegiatan Ekonomi di PPP Morodemak Tahun 2019.

No	Sumber Penerimaan	Penerimaan (Rp/tahun)	Net benefit (Rp/tahun)
1	Usaha pengolah ikan (56)	19.225.000	1.076.600.000
2	Usaha air bersih (2)	23.845.000	47.690.000
3	Usaha sewa blong/basket (9)	4.826.190	43.435.710
4	Usaha es batu (1)	175.700.000	175.700.00
5	Usaha MCK (1)	5.160.000	5.160.000
6	Usaha jual pakaian (5)	13.476.667	67.383.335
7	Usaha warung klontong (15)	1.861.852	27.927.780
8	Usaha jual sembako (10)	10.435.667	104.356.667
9	Usaha penyalur BBM/Solar (1)	6.500.555.627	6.500.555.627
10	Usaha Penangkapan Ikan Purse Seine	1.295.601.471	72.553.682.353
11	Usaha Penangkapan Ikan Purse Seine tipe waring	48.542.256	2.330.028.300
10	PPP Morodemak		353.495.065
TOTAL			83.181.658.170

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Total penerimaan lapangan kerja yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional pelabuhan apabila diperoleh sebesar Rp 83.181.658.170. Nilai ini didapat dari total penerimaan dari unit usaha ekonomi di kawasan PPP Morodemak antara lain usaha penyalur air bersih, usaha pengolah ikan (pengolahan ikan), usaha es batu, usaha sewa blong/basket, usaha mck, usaha jual pakaian, usaha penangkapan ikan (*purse seine* dan *purse seine* tipe waring) dan usaha warung/ kelontong dan total penerimaan pelabuhan selama setahun. Total keseluruhan unit usaha yang dihitung dan dianalisa nilai keuntungannya yaitu sebanyak 200 pengelola usaha yang didapat dari 81 responden. Penerimaan tiap unit usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan operasional pelabuhan per tahun oleh PPP Morodemak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya lapangan kerja yang dibuka oleh PPP Morodemak yaitu pembangunan kios-kios sebagai wadah dalam membuka lapangan pekerjaan. Menurut Hasanah *et al.* (2015), menyebutkan bahwa apabila tingkat keuntungan/penerimaan yang diperoleh tinggi, maka usaha ekonomi tersebut lebih berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila rasio imbalan tenaga kerja terhadap nilai tambah tinggi, maka usaha ekonomi yang demikian lebih berperan dalam memberikan pendapatan bagi pekerjanya, sehingga lebih berperan dalam mengatasi masalah pengangguran melalui pemerataan kesempatan kerja.

2. Nilai Biaya

Nilai biaya pembangunan dan biaya perawatan meliputi pebanguna dermaga, pembangunan kios 20 unit, pembangunan gedung produksi, pembangunan tempat packing, rehab gedung kantor PPP Morodemak, pengadaan *meubeler* gedung pelayanan terpadu, biaya pemeliharaan bangunan, biaya pemeliharaan bangunan, pengerukan sungai tuntang dan alur pelayaran, Rehab gedung pengolahan ikan, rehab dermaga, rehab brak basket ikan, pengurangan dan peninggian lahan, pembangunan drainase, dan pembangunan jalan pelabuhan yang menghabiskan dana dengan total sebesar Rp 48.842.324.700. Sehingga diketahui penyeteraan nilai biaya total pada tahun 2019 sebesar Rp 79.410.122.677 dengan *Discount rate* yang digunakan yaitu sebesar 5% per tahun, karena sesuai dengan tingkat suku bunga rata-rata yang berlaku pada Bank Indonesia tahun 2019.. Nilai biaya investasi dan perawatan yang disetarakan berdasarkan penggunaan dalam menunjang kegiatan ekonomi di sekitar PPP Morodemak, Jawa Tengah.

3. *Net Present Value* (NPV)

Analisis manfaat dan biaya fasilitas PPP Morodemak, tingkat diskonto digunakan untuk melakukan perhitungan antara lain NPV dan *B/C ratio*. Analisis manfaat dan biaya PPP Morodemak dengan perhitungan NPV dihasilkan nilai NPV sebesar Rp 3.771.535.493 dengan tingkat diskonto yang digunakan sebesar 5% per tahun, sesuai dengan tingkat suku bunga rata-rata yang berlaku pada bank saat ini. Hasil tersebut didapatkan dari pengurangan nilai manfaat sekarang dengan nilai biaya sekarang. Mengetahui hasil perhitungan NPV tersebut positif, jadi dengan dibangunnya PPP Morodemak memberikan dampak positif dan layak dilaksanakan sebagai pelabuhan perikanan pantai dengan tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai dan memberikan manfaat yang lebih besar kedepannya. Hal ini diperkuat oleh Suherman dan Adhyaksa (2009), apabila suatu usaha atau proyek memiliki nilai NPV positif, maka usaha atau proyek tersebut layak dilaksanakan karena akan memberikan manfaat yang lebih besar.

4. Nilai *B/C Ratio*

Hasil perhitungan *B/C ratio* analisis manfaat dan biaya diperoleh *B/C ratio* sebesar 1,04 yang berarti nilai manfaat sekarang netto lebih besar dari biaya sekarang netto. Berdasarkan perhitungan kriteria nilai *B/C ratio* yaitu lebih besar dari satu, maka proyek dan operasional pengembangan PPP Morodemak dapat dikategorikan layak untuk dilaksanakan karena memiliki nilai manfaat yang besar. Berdasarkan analisis biaya dan manfaat pengembangan PPP Morodemak yang mengacu kepada kriteria kelayakan ekonomi, yaitu NPV dan *B/C ratio* menunjukkan bahwa PPP Morodemak menguntungkan dan layak dikembangkan dengan didukung fasilitas-fasilitas yang tersedia di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. Manfaat dari pengembangan PPP Morodemak meliputi manfaat langsung (*direct benefit*) yang merupakan hasil *return* yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, *output* berupa barang dan jasa yang dihasilkan (nilai jual dari bahan bakar, es, air, biaya tambat kapal, jasa fasilitas perbengkelan dan lain-lain) dan manfaat tidak langsung (*indirect benefit*); merupakan *benefit* yang dirasakan atau diterima oleh kegiatan atau sektor lain yang erat hubungannya dengan adanya proyek. Hal ini diperkuat oleh Suherman (2007), penggunaan fasilitas yang dikenakan biaya pemakaian merupakan manfaat yang diterima secara langsung dalam bentuk nilai manfaat. Seluruh penerimaan yang dikenakan dalam penggunaan maupun penerimaan dana modal investasi merupakan arus kas masuk. Fasilitas yang memberikan manfaat berupa penerimaan antara lain tambat labuh kapal, TPI, sewa tanah dan gedung, *slipway* atau *docking*, pas masuk, listrik, air bersih, solar, keranjang ikan dan penggunaan jasa dari fasilitas fungsional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Ekonomi Dampak Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketersediaan fasilitas-fasilitas pelabuhan seperti fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak sudah memadai dalam menunjang kegiatan operasional perikanan di PPP Morodemak dan sesuai dengan kriteria fasilitas yang harus ada di Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012.
2. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya pembangunan dan pengembangan PPP Morodemak adalah dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pantai yaitu terjadinya peningkatan usaha dan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar, di mana hal ini akan berpengaruh pada pendapatan dilihat dari hasil analisis biaya dan manfaat, keberadaan fasilitas PPP Morodemak memberikan manfaat yang besar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Ekonomi Dampak Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah” dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, ketersediaan fasilitas di PPP Morodemak kurang sesuai dengan PER/MEN/KP/NO.8/2012 sehingga direkomendasikan untuk pihak pelabuhan untuk memperbaiki dan menganggarkan penambahan fasilitas pelabuhan yang belum terdapat pada pelabuhan perikanan pantai.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini, dampak ekonomi dari pembangunan dan pengembangan PPP Morodemak yaitu dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pantai yang disarankan

untuk masyarakat sekitar PPP Morodemak mendapat penghasilan cukup dengan membuka lapangan pekerjaan baru dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang telah disediakan di PPP Morodemak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
- Bishop, J.T. 1999. *Valuing Forests : A Review of Methods and Applications in Developing Countries*. International Institute for Environment and Development. London.
- Gumilang, A. P. 2016. Pola Hubungan Pelabuhan Perikanan di Pantai Utara Jawa Berdasarkan Aspek Operasional dan Distribusi Hasil Tangkapan. SKRIPSI. 74 Hlm.
- Hasanah, U., Mayshuri dan Djuwari. 2015. Analisis Nilai Tambah Agroindustri Sale Pisang di Kabupaten Kebumen. *Ilmu Pertanian*. 18(3):141-149.
- Luasunaung, A. 2011. Analisis Musim Penangkapan Ikan Teri (*Stoleptorus sp.*) di Teluk Dodinga, Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*. 7(1):6-11.
- Mahottama, R. G., Amiek S. dan Indarja. 2017. Pelaksanaan Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kabupaten Demak. *Diponegoro Law Journal*. 6(2):1-13.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
- Restumurti, D., Aziz N. B. dan Dian A. N. N. D. 2016. Analisis Pendapatan Nelayan Alat Tangkap Mini Purse Seine 9 GT dan 16 GT di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak, Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 5(1):78-85.
- Saputri, D. W., Aziz N. B. dan Sulistyani D. P. 2017. Analisis Kualitas Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak, Kabupaten Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 6(3):65-73.
- Sugiyono. 2001. Statistik Non Parametris untuk Penelitian. Penerbit Alfa Beta. Bandung.
- Suherman, A. 2007. Rekayasa Model Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. (Disertasi).
- Suherman, A. dan Adhiyaksa D. 2009. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur. *Jurnal Saintek Perikanan*. 5(1):25-30.